



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS PURNOMO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
3. NHK : **848409**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 457 m²/150 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 541 m²/250 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, LAINNYA Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **156.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG/KF10 Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA/C100 Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X/NF 100 D Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. MOTOR, HONDA SF 125 TR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **5.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **500.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **461.500.000**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 461.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.